

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital ini dalam memperluas daerah pemasaran serta dalam peningkatan penjualan, perusahaan biasanya melakukan kebijaksanaan melakukan pembelian kredit kepada pihak luar perusahaan. Pemberian kredit dapat berupa pemberian pinjaman uang atau dengan penjualan kredit yang diberikan selain penjualan tunai. Pembelian kredit ini terbukti mampu menarik pelanggan lebih banyak khususnya pada saat penjualan kredit dari pada penjualan tunai. Penjualan dengan jenis tunai adalah jenis penjualan yang dilaksanakan secara tunai. Pembayaran dilakukan oleh pembeli secara cash atau selesai dalam satu kali transaksi. Jenis penjualan kredit merupakan jenis penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara cicil dalam rentan waktu tertentu. Jumlah cicilannya disesuaikan dengan berapa lama kredit yang diambil. Biasanya, penjual akan menambahkan bunga untuk setiap cicilan. Tetapi ada juga yang tanpa bunga.

Perusahaan yang melakukan kebijaksanaan dalam melakukan pemberian kredit juga harus mempertimbangkan resiko atau dampak dari pemberian kredit tersebut yang memungkinkan adanya pelanggan atau konsumen yang menunggak pembayaran karena ketidakmampuan atau kesenjangan pelanggan untuk tidak melakukan pembayaran.¹

¹ Rini, A., Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Piutang Pada PT. Barata Indonesia (Persero) Medan, Jurnal Ekonomi , 2018, hal 1

Perusahaan banyak melakukan usaha untuk mencapai tujuannya, dimana tujuan umumnya yaitu mencapai laba yang optimal, berkembang, dan berkesinambungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, faktor utama yang harus dipertahankan adalah bagaimana cara mengoptimalkan laba, dan hal ini dapat dilakukan dengan aktivitas penjualan karena dengan penjualan mengakibatkan bertambahnya aktiva dalam perusahaan, yang biasanya berupa kas dan piutang.

Mayoritas penjualan dilakukan atas dasar kredit, dan melibatkan tugas-tugas seperti penyiapan pesanan penjualan, pembelian kredit, pengiriman produk ke pelanggan, penagihan pelanggan, pencatatan transaksi dalam akun. Piutang usaha suatu perusahaan pada umumnya merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar serta bagian terbesar dari total aktiva perusahaan. Pemberian piutang mengandung resiko bagi perusahaan berupa kerugian apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Oleh karena itu pengendalian intern terhadap piutang usaha sangat penting. Kecurangan dalam suatu siklus kerja juga sering terjadi sehingga dapat merugikan perusahaan. Kecurangan yang mungkin terjadi pada bagian piutang usaha adalah tidak dicatatnya piutang dari debitur, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang, tidak menagih piutang tepat waktu.

Maka untuk mengatasi masalah tersebut, maka perusahaan harus mempunyai pengendalian intern yang baik atas piutangnya. Menurut Diana bahwa, **“Pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakrutan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut,**

meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.”²

Menurut Soemarso, mengungkapkan bahwa, **“Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan.”³**

Berdasarkan pengertian dari pengendalian intern dan pengertian piutang, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pengendalian intern adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan sebuah perusahaan, dengan menetapkan suatu badan untuk mengantisipasi kemungkinan piutang sangsi (piutang tak tertagih), serta mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan atau pihak tertentu yang merugikan perusahaan. Suatu perusahaan dapat menjamin pelanggan mampu melaksanakan pembayaran atas penjualan kredit yang diberikan, dan juga harus dapat menjamin bahwa uang tunai hasil penagihan yang diterima petugas dari pelanggan mengalir ke kas perusahaan. Pada pengendalian intern piutang yang baik harus terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi akuntansi, fungsi kas, fungsi piutang, dan fungsi penagihan. Fungsi penjualan bertugas untuk menerima order penjualan, fungsi kredit bertugas melakukan analisis kredit serta memberikan persetujuan atas pemberian kredit, fungsi akuntansi bertugas menangani catatan akuntansi yang berhubungan dengan transaksi penjualan kredit, fungsi kas bertugas menerima uang tunai hasil penagihan

² Diana, Anastasia, & Setiawati, d. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011

³ Soemarso, S. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Selemba Empat, 2005

piutang, sedangkan fungsi penagihan bertugas melakukan penagihan atas piutang dari pelanggan.

Pemberian piutang mengandung resiko bagi perusahaan berupa kerugian apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Kecurangan dalam suatu siklus kerja juga sering terjadi sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian. Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi.

Pengendalian intern adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengantisipasi kecurangan dan mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih, dengan adanya pengendalian piutang dapat meminimalisasi kerugian yang diakibatkan piutang tak tertagih. Pengendalian intern perusahaan merupakan suatu rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menjaga asset, memberikan informasi yang akurat, mendorong mematuhi peraturan dan ketentuan manajemen yang telah ditetapkan.⁴

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan atau PTPN III adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Dilihat dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, piutang merupakan suatu komponen aktiva lancar yang sangat memegang peranan yang besar dalam upaya tercapainya tujuan perusahaan, sehingga piutang harus memiliki pengawasan yang sangat baik agar terhindar dari

⁴ Gary, H. **Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada PT. Nusantara Surya Sakti.** *EMBA*, 2013, hal. 275

penyelewengan/ kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan atau pihak lain, yang dapat merugikan suatu perusahaan.

Untuk itu sistem pengendalian internal berperan penting untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan perusahaan. Sistem pengendalian intern merupakan suatu metode yang digunakan untuk menjaga asset perusahaan, mengecek laporan atau data akuntansi dan sebagai motivasi agar dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern yaitu meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Pada saat pelaksanaan manajemen piutang, resiko kecurangan karyawan atas kas, serta resiko kegagalan menagih piutang merupakan masalah yang sangat perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian intern untuk menilai pelaksanaan pengawasan intern serta mengetahui kebijakan manajemen perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Serta untuk mengevaluasi pengendalian intern piutang yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan berkesinambungan (*going concern*) serta mencegah adanya penyelewengan/kecurangan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Operasional Keuangan dan Akuntansi (BOKA) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan diperoleh daftar piutang berikut ;

Tabel 1.1
Data Piutang PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan
Tahun 2016-2020

Tahun	Piutang Niaga	Piutang Lain-lain	Piutang Sangsi (tak tertagih)
2020	176.296.227.670	11.142.287.988.890	12.795.272.629
2019	117.853.045.800	10.207.377.900.642	12.795.272.629
2018	185.838.623.335	6.863.972.252.377	9.753.897.905
2017	132.337.115	4.170.142.117.271	10.541.729.016
2016	132.337.115	1.628.268.446.281	5.651.891.985

Sumber: BOKA PT. Perkebunan Nusantara III (Medan)

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah piutang sangsi (piutang tak tertagih) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dari tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan piutang sangsi (piutang tak tertagih) maka tujuan sistem pengendalian intern yang tidak tercapai yaitu mengamankan sumber daya terhadap kemungkinan kerugian akibat pelepasan, penyalahgunaan, kesalahan pengelolaan, kekeliruan dan kecurangan, serta membuat data keuangan dan manajemen yang dapat diandalkan serta pengungkapan yang wajar pada pelaporan yang tepat.

Untuk itu supaya sistem pengendalian intern atas piutang pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan bisa semakin diperhatikan oleh perusahaan. Pentingnya sistem pengendalian intern yang baik dalam pengelolaan piutang usaha, untuk mengantisipasi kemungkinan piutang sangsi (piutang tak tertagih), dengan adanya pengendalian piutang ini

diharapkan perusahaan dapat meminimalisasi kerugian yang timbulkan dari piutang sangsi (piutang tak tertagih) tersebut, agar manfaat yang diperoleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dimasa depan sebesar jumlah yang diharapkan.

Berdasarkan fenomena tersebutlah, sehingga penulis tertarik untuk membahas terkait pengendalian internal dalam tulisan skripsi yang berjudul ; **“SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PIUTANG PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah penelitian atau topik penelitian berpengaruh terhadap kualitas penelitian. Artinya masalah penelitian yang teridentifikasi dengan matang diawal akan menentukan penelitian yang dihasilkan. Secara umum, masalah penelitian dapat diartikan sebagai pernyataan yang mempertanyakan tentang satu atau beberapa variabel yang ada dalam satu fenomena.

Jadi berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan apa yang menjadi fenomena atau permasalahan yang dihadapi PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan yaitu

“Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern atas piutang pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah **“Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern atas piutang pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan”**

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Manfaat dilakukannya penelitian ini bagi penulis adalah untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi strata satu (S1), serta menambah wawasan penulis bahwa pentingnya penerapan sistem pengendalian intern atas piutang terhadap suatu perusahaan, untuk meminimalisir kerugian perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Manfaat dilakukannya penelitian ini bagi perusahaan adalah sebagai bahan dan masukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan secara optimal di masa yang akan datang, dengan memperhatikan pentingnya penerapan sistem pengendalian intern atas piutang yang efektif bagi suatu perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat dilakukannya penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah dapat menjadi referensi atau ilmu baru untuk mengembangkan

penelitian yang ingin dilakukan, khususnya terkait dengan penerapan sistem pengendalian intern atas piutang bagi suatu perusahaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem

2.1.1.1 Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.

Menurut Mei Hotma Mariati Munte, **“Sistem merupakan sekumpulan unsur atau komponen dan prosedur yang harus berhubungan erat (interrelated) satu sama lain dan berfungsi secara bersama-sama agar tujuan yang sama dapat dicapai.”**⁵

Setiap sistem dibuat untuk mencapai suatu tujuan (*goal*) atau sasaran (*objectives*). Tujuan meliputi ruang lingkup yang luas, sedangkan sasaran lebih dikenal pada sub-sistemnya karena meliputi ruang lingkup yang sempit dibandingkan tujuan. Tujuan maupun sasaran pada prinsipnya adalah sesuatu yang hendak diraih untuk memenuhi kebutuhan dan

⁵ Mei, M. M. *Sistem Informasi Akuntansi*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2017, hal. 1

kegiatan serta sifatnya senantiasa positif, sehingga alat ukur tercapainya suatu tujuan/sasaran adalah kepuasan.

2.1.1.2 Elemen Sistem

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu

a. Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan (goal), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan ini lah yang banyak menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda.

b. Masukan

Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan).

c. Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya sisa pembuangan atau

limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien.

d. Keluaran

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.

e. Batas

Yang disebut batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepakbola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain.

f. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

g. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan

dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

2.1.1.3 Komponen- Komponen Yang Membangun Sistem

Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, meliputi fasilitas dan aktivitas, dan kalau ditinjau berdasarkan komponen-komponen yang membangun sistem maka terdiri atas:

- 1. Subsistem, terdiri atas sejumlah unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam membentuk satu kesatuan untuk mencapai suatu sasaran, setiap subsistem ini memiliki fungsi atau peranan tersendiri yang akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan, fungsi ini menunjukkan adanya aktivitas yang meliputi; masukan, pengolah, dan keluaran.**
- 2. Batas sistem, merupakan batas wilayah aktivitas (kinerja) dari sistem terhadap sistem lain atau lingkungan luar, batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan dan batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut dan batas sistem biasanya ditunjukkan dari nama sistem itu sendiri.**
- 3. Lingkungan luar sistem, merupakan bagian diluar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem secara langsung maupun tidak langsung, lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan merugikan, ada yang berbentuk sistem maupun non sistem.**
- 4. Penghubung, merupakan sarana penghubung antar subsistem yang ada dalam sistem, sehingga memungkinkan mengalirnya sumber-sumber daya antar subsistem.**
- 5. Tujuan, merupakan sesuatu yang ingin diraih/ dicapai dalam rangka untuk memenuhi keinginan dalam suatu sistem, sehingga aktivitas sistem secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai tujuan agar mendapatkan nilai guna (manfaat), sasaran dari sistem terjadi pada masing-masing subsistem yang ada, di mana faktor yang paling menentukan dalam hal pencapaian sasaran adalah masukan yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem.⁶**

⁶ Ibid, hal. 2-3

2.1.2 Pengendalian Intern

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Intern

Standar Auditing mendefenisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini :

1. **Keandalan laporan keuangan.**
2. **Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.**
3. **Efektifitas dan efisiensi operasi⁷**

Berikut ini merupakan pengertian dari pengendalian intern menurut

beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

Susanto mengungkapkan : **“Pengendalian intern adalah pengendalian (control) meliputi semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.”⁸**

Menurut Hery, **“Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersediannya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/ Undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.”⁹**

Berdasarkan pengertian pengendalian intern yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengendalian intern adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh sebuah perusahaan dengan tujuan menjaga asset atau kekayaan suatu perusahaan untuk menghindari penyelewengan/ kecurangan yang dibuat karyawan atau pihak lain yang dapat

⁷ Victor, S. H., & Danri, S. T. *Audit II*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2018

⁸ Susanto, A. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya, 2008

⁹ Hery. *Dasar Akuntansi*. Jakarta: Media Kom., 2013

merugikan perusahaan. Penulis juga menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu bentuk elemen yang dijadikan suatu organisasi untuk menjaga atau mengawasi asset atau harta suatu perusahaan.

2.1.2.2 Unsur Pokok Pengendalian Intern

Pengendalian intern terdiri dari 5 unsur pokok (komponen) yang saling berkaitan berikut ini :

1. Lingkungan pengendalian

Mengambarkan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran orang-orang yang ada dalam organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, yang lingkungan pengendalian mencakup berikut ini :

- a. Nilai integritas dan etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
- e. Struktur organisasi
- f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- g. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

2. Penaksiran resiko

Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan manajemen terhadap resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) di Indonesia.

Resiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Resiko tersebut dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut :

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi
- b. Personal baru
- c. Sistem informasi yang baru atau diperbaiki
- d. Teknologi baru
- e. Lini produk, produk atau aktivitas baru
- f. Restrukturisasi korporasi
- g. Operasi luar negeri
- h. Standar akuntansi baru

3. **Aktivitas pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan jaminan bahwa arahan (petunjuk) manajemen dilaksanakan. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikelompokkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini:

- a. **Review terhadap kinerja**
- b. **Pengolahan informasi**
- c. **Pengendalian fisik**
- d. **Pemisahan tugas**

4. **Informasi dan komunikasi**

Informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan kumpulan dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva, hutang dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan sistem akuntansi tersebut akan mempengaruhi kemampuan manajemen untuk pengambilan keputusan dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Tujuan auditor memperoleh pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi tersebut adalah untuk memahami :

- a. **Golongan transaksi dalam operasi entitas**
- b. **dimulainya transaksi**
- c. **Catatan akuntansi, informasi pendukung dan akun tertentu dalam laporan keuangan tertentu dalam laporan keuangan yang terkait dalam pengolahan dan laporan transaksi.**
- d. **Pengolahan akuntansi dari mulai transaksi sampai dengan penyajiannya di laporan keuangan termasuk alat elektronik yang digunakan.**

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab orang (personil) yang berkaitan dengan pengendalian intern, dan cara yang digunakan untuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pelaporan keuangan dan masalah-masalah penting yang berkaitan dengan laporan keuangan.

5. **Pengawasan**

Pengawasan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan desain operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi yang dilaksanakan personil yang berwenang untuk itu, biasanya dilaksanakan oleh auditor.¹⁰

¹⁰ Victor, S. H., & Danri, S. T., *OP.CIT.*, hal. 1-5

2.1.2.3 Tujuan pengendalian Intern

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan dari pengendalian internal menurut Krismiaji (2015 ;319) adalah sebagai berikut;

1. **“Keandalan Laporan Keuangan Umumnya, pengendalian yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.**
2. **Efektivitas dan efisiensi operasi**
Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor dalam prosedur audit. Sebagai contoh, pengendalian yang berkaitan dengan data non keuangan yang digunakan oleh auditor dalam prosedur analitik.
3. **Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku**
Suatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.”¹¹

Menurut Mulyadi (2010 : 163) “ Tujuan Sistem Pengendalian

Internal” adalah :

1. **“Menjaga kekayaan organisasi.**
Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan

¹¹ Krismiaji. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015

perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. **Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.**
Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.
3. **Mendorong efisiensi.**
Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.
4. **Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.**
Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.”¹²

Menurut Abdul Halim (2001;191), struktur pengendalian intern

yang efektif dirancang dengan tujuan pokok sebagai berikut ;

1. **“Menjaga kekayaan dan catatan organisasi**
2. **Ketelitian dan keandalan data akuntansi**
3. **Mendorong efisiensi**
4. **Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”**¹³

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk

¹² Mulyadi. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat, 2010, hal. 163

¹³ Abdul, H. *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)* (Edisi Keempat ed.). Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008, hal. 191

memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

2.1.2.4 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut Mulyani (2014;164) menyatakan bahwa : **“Unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah:**

- 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggungjawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:**
 - 1. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.**
 - 2. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.**
 - 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksanannya setiap transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.**
 - 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya**

ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

- a. penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
- b. Pemeriksaan mendadak.
- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi.
- d. Perputaran jabatan
- e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
- f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.
- g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.”¹⁴

2.1.2.5 Pemahaman Pengendalian Intern

Standar pekerjaan lapangan yang kedua dari Standar Auditing menyatakan :”Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan.

Dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa auditor yang mengaudit laporan keuangan diwajibkan untuk memperoleh pemahaman yang memadai untuk :

- 1. Merencanakan audit**
- 2. Menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang dilakukan.**

Secara umum auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern kliennya untuk perencanaan auditnya. Namun, secara khusus, pemahaman tentang pengendalian intern tersebut harus yang berkaitan dengan asersi laporan keuangan, digunakan untuk ;

¹⁴ Mulyadi. **Auditing**. Jakarta: Salemba Empat, 2014

1. Kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan (dilanjutkan)
2. Mengidentifikasi tipe-tipe salah saji yang potensial dalam laporan keuangan.
3. Mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko deteksi.
4. Merancang pengujian substansif yang direncanakan.
 Pada pemahaman untuk perencanaan ini, auditor mengumpulkan informasi untuk :
 1. Memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan.
 2. Apakah pengendalian tersebut dioperasikan (dilaksanakan)¹⁵

2.1.2.6 Identifikasi Sasaran Pengendalian

Untuk membantu audit laporan keuangan, sebaiknya auditor mengidentifikasi sasaran pengendalian (*control objectives*). Ada 5 sasaran pengendalian yaitu sebagai berikut :

1. **Validity (Keabsahan)**
 Yaitu : untuk membuktikan bahwa semua transaksi yang dicatatkan benar-benar terjadi. Jadi tidak ada transaksi yang fiktif dicatatkan.
2. **Completeness (Kelengkapan)**
 Yaitu : untuk membuktikan bahwa semua transaksi yang absyah telah dicatatkan.
3. **Recording Propriety (Ketertiban Pencatatan)**
 Yaitu : untuk membuktikan bahwa detail transaksi diperoleh datanya secara akurat dari dokumen sumber dan dinilai, diklasifikasikan, diposting, dan diikhtisarkan secara tepat.
4. **Safeguarding (Pengamanan)**
 Yaitu : untuk membuktikan bahwa dokumen yang belum digunakan dan dicatat disimpan dalam tempat yang aman dan pengaksesannya harus sesuai otorisasi manajemen.
5. **Subsequent Accountability (Pertanggungjawaban Kemudian)**
 Yaitu : untuk membuktikan bahwa saldo aktiva dan kewajiban yang dicatatkan harus dibandingkan dengan yang ada pada periode waktu tertentu dan jika ada perbedaan (selisis) harus diteliti.¹⁶

¹⁵ Victor, S. H., & Danri, S. T., *OP.CIT.*, hal 4-5

¹⁶ Victor, S. H., & Danri, S. T., *OP.CIT.*, hal. 6

2.1.3 Piutang

2.1.3.1 Defenisi Piutang

Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain yang terkait dengan transaksi penjualan/pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya.

Bagi suatu perusahaan dagang, besarnya pendapatan dihasilkan dari penjualan karena merupakan unsur terbesar yang berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Untuk memperoleh laba yang optimal, perusahaan menempuh dengan salah satu cara yaitu penjualan kredit. Penjualan yang dilakukan secara kredit diharapkan dapat meningkatkan volume pendapatan akan tetapi menimbulkan munculnya perkiraan piutang. Piutang itu sendiri merupakan hak perusahaan untuk menuntut pembayarannya atas penjualan barang atau jasa kepada pihak pelanggan. Jumlah piutang pada suatu waktu ditentukan oleh dua faktor:

1. Volume penjualan dan
2. Rata-rata waktu antara penjualan dan penerimaan pembayaran.

Semakin besar volume penjualan kredit dan semakin panjang waktu penagihan piutang akan memperbesar piutang. Hal ini beresiko akan adanya bagian piutang yang tak tertagih. Tingkat yang tinggi akan mengurangi arus kas dan piutang tak tertagih akan mengurangi keuntungan dari penjualan. Oleh karena itu, penanganan akan piutang diharapkan

dapat terealisasi dikarenakan piutang merupakan kelompok asset lancar yang berperan penting dalam kegiatan operasional perusahaan.

Berikut ini adalah beberapa pengertian defenisi piutang menurut beberapa ahli :

Soemarso mengatakan, Yang dimaksud dengan piutang yaitu : **“Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan.”**¹⁷

Zaki juga mengatakan bahwa, **“Piutang usaha merupakan piutang usaha yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan yang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.”**¹⁸

Novi Mengatakan, **“Piutang adalah usaha menunjukkan adanya klaim perusahaan kepada pihak (perusahaan) lain kepada bentuk uang, barang, jasa, atau dalam bentuk aktiva non kas lainnya yang harus dilakukan penagihan pada tanggal jatuh temponya. Piutang usaha dapat berupa tagihan yang timbul karena penjualan barang dagangan dan jasa atau penjualan aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit dan transaksi-transaksi lain.”**¹⁹

Berdasarkan pada pengertian para ahli yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa piutang adalah suatu bentuk pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pihak lain (konsumen) dalam bentuk penjualan kredit, yang harus dibayar oleh pembeli dengan jangka

¹⁷ Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar* ,(Edisi ke 5 ed.). Jakarta: Salemba Empat, 2009, hal. 338

¹⁸ Zaki, B. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE, 2000

¹⁹ Novi, V. *Analisis Pengendalian Intern Atas Piutang Pada PT. BPR Rajekwesi Sumberrejo Bojonegoro. Akuntansi manajemen*, 2020, hal. 29.

waktu yang sudah disepakati antara pihak perusahaan dengan konsumen, dengan tujuan memberikan kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan.

2.1.3.2 Jenis- Jenis Piutang

Piutang timbul apabila perusahaan (seseorang) menjual barang atau jasa kepada perusahaan lain (atau orang lain) secara kredit. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit.

Dalam praktek dikenal dua jenis piutang, yaitu piutang dagang dan piutang wesel. Piutang dagang adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh si pembeli kepada perusahaan. Piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari satu tahun. Oleh karena itu piutang dagang dalam neraca dilaporkan sebagai aktiva lancar. Piutang dagang harus dibedakan dari piutang wesel ataupun piutang pendapatan (pendapatan yang masih akan diterima) dan dari aktiva lain yang tidak timbul dari penjualan sehari-hari, karena piutang dangang berkaitan erat dengan operasi perusahaan yang utama. Selain itu jumlah rupiah yang dimasukkan sebagai piutang dagang harus dapat ditagih dalam jangka waktu normal yang tercermin dalam termin penjualan yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, apabila perusahaan menetapkan termin penjualan $2/30, n/30$, maka piutang yang timbul

diharapkan akan dapat diterima dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak transaksi penjualan terjadi.

Piutang wesel atau lebih formal bila dibandingkan dengan piutang dagang. Debitur (pihak yang harus membayar) dalam piutang wesel membuat suatu janji tertulis kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat janji tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Jangka waktu wesel bias bermacam-macam, tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari. Surat wesel yang dipegang oleh pihak kreditur menjadi tanda bukti adanya piutang wesel. Berbeda dengan piutang dagang, piutang wesel bias juga timbul karena transaksi peminjaman uang.

Piutang wesel yang berjangka waktu satu tahun atau kurang dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar, tetapi bila jangka waktunya melebihi satu tahun, maka diperlakukan sebagai piutang jangka panjang. Kadang-kadang piutang wesel dapat dilunasi secara angsuran. Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun diperlakukan sebagai aktiva lancar, sedangkan bagian yang lebih dari satu tahun dilaporkan sebagai piutang jangka panjang.

Piutang lain-lain terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Dalam kategori ini termasuk di dalamnya piutang kepada karyawan perusahaan, direksi perusahaan, dan piutang kepada cabang-cabang perusahaan. Pada umumnya piutang semacam ini termasuk piutang jangka panjang, tetapi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dilaporkan sebagai aktiva lancar. Piutang wesel jangka panjang dan piutang lain-lain biasanya dilaporkan dalam neraca di bawah (sesudah) aktiva lancar, yaitu pada kelompok aktiva tak lancar sebelum aktiva tetap. Dalam buku besar, setiap jenis piutang dicatat dalam rekening tersendiri. Apabila perlu setiap rekening piutang dapat juga dilengkapi dengan buku pembantu piutang.²⁰

²⁰ Al, H. J., *Dasar-dasar Akuntansi*, (Edisi 6 ed.). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2001

2.1.3.3 Kategori Piutang

Kategori piutang dipengaruhi jenis usaha entitas. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang (piutang usaha) dan piutang lainnya. Untuk entitas perbankan, piutang adalah kredit yang disalurkan kepada pihak lain, dalam laporan posisi keuangan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan. Perusahaan pembiayaan selain bank (multifinance), menghasilkan piutang menurut jenis pembiayaan misalnya piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan sewa, dan piutang pembiayaan kartu kredit.

Bentuk klaim pada pihak lain dapat didasarkan perjanjian utang piutang secara tertulis, namun dapat juga didasarkan perjanjian utang piutang secara tertulis, namun dapat juga didasarkan pada perjanjian atau komitmen tidak tertulis. Klaim yang didasarkan perjanjian tertulis disebut wesel tagih (*notes receivable*). Piutang dapat juga didasarkan pada faktur (*invoice*) dari transaksi penjualan, disebut piutang dagang (*account receivable* atau *trade receivable*). Piutang dagang muncul dari transaksi pendapatan atau penjualan yang dilakukan secara kredit.

Piutang dagang biasanya tidak ada bunga dan jangka waktu pelunasan singkat tergantung kebijakan kredit yang diberikan. Piutang yang jatuh temponya kurang dari satu tahun atau siklus operasi diklasifikasikan sebagai asset lancar. Piutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun diklasifikasikan sebagai asset tidak lancar.²¹

2.1.3.4 Sistem Akuntansi Piutang

²¹ Jadongan, S. **Akuntansi Keuangan Intermediete**, (Edisi 1 ed.). Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2018, hal. 91-92

Sistem akuntansi merupakan bagian dari analisis sistem informasi piutang suatu perusahaan. Tanpa informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi, manajemen tidak akan mempunyai kemampuan untuk merencanakan dan mengarahkan operasi kegiatan perusahaan.

Sedangkan menurut Mulyadi, **“Sistem informasi akuntansi piutang dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya piutang dan berkurangnya piutang”**.²²

Terjadinya piutang berasal dari transaksi retur penjualan dan penerimaan kas dan piutang. Transaksi berkurangnya piutang yang timbul dari transaksi penerimaan kas dari piutang ke kelompok dalam sistem akuntansi kas.

2.1.3.5 Pengertian Piutang Sangsi (Piutang Tak Tertagih)

Seharusnya hasil penjualan produk membawa perusahaan kepada keuntungan. Namun adanya piutang membuat kondisi berbanding terbalik. Perusahaan justru mendapatkan piutang tak tertagih sebagai akibat pembeli tidak membayar pinjaman. Menurut Al Haryono, **“Piutang sangsi (Piutang tak tertagih) adalah piutang yang dapat menimbulkan kerugian karena debitur tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya.”**²³

2.1.3.6 Kerugian Piutang

Cadangan kerugian piutang (cadangan piutang ragu-ragu) merupakan akun tandingan atas piutang dagang. Perusahaan akan mencatat beban piutang sangsi (piutang tak tertagih) untuk jumlah yang telah diperkirakan dan

²² Mulyadi., **OP.CIT.**,hal.16

²³ Al Haryono Yusuf.,**OP.CIT.**,hal 55

membentuk cadangan kerugian piutang. Tujuan menentukan taksiran piutang sangsi (piutang tak tertagih) adalah :

- a. Dapat diperhitungkan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjual, sehingga diperoleh laba periodik yang teliti atau mendekati teliti.
- b. Menunjukkan nilai piutang dagang yang dapat direalisasikan.
Penentuan atas jumlah beban piutang tak tertagih dan cadangan kerugian piutang dapat berasal dari dua (2) pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Persentase-Penjualan (Laporan Laba-Rugi)

Pendekatan persentase penjualan menghitung beban piutang tak tertagih sebagai persentase dari penjualan kredit bersihnya. Metode ini disebut juga pendekatan laba rugi karena dipusatkan pada jumlah bebannya. Pendekatan persentase-penjualan menandingkan biaya dengan pendapatan karena hal ini mengaitkan beban pada periode dimana penjualan dicatat

2. Pendekatan Persentase-Piutang (Neraca)

Tujuan dari pendekatan persentase piutang adalah melaporkan nilai realisasi bersih piutang dalam neraca. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan persentase-piutang atau neraca (*percentage of receivable* atau *balance sheet approach*). Cara ini dapat dibagi dua (2) metode, yaitu berdasarkan pada persentase tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha atau bisa juga berdasarkan pada klasifikasi atau pengelompokan umur piutang.²⁴

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Atas Piutang

2.1.4.1 Perlakuan Sistem Pencatatan Piutang Usaha

Berikut ini merupakan perlakuan sistem pencatatan piutang usaha yaitu sebagai berikut :

1. Pengakuan Piutang Usaha

Pengakuan piutang usaha relative mudah. Pengakuan piutang sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan kas terealisasi atau

²⁴ Imanuella, C. d., Analisis Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Metta Karuna Jaya Makassar. *EMBA*, 2015, hal. 697

direalisasi, maka piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli, sedangkan penjualan jasa umumnya diakui pada saat penyerahan jasa atau jasa itu dilaksanakan. Karena saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat-syarat penjualan maka piutang lazimnya diakui pada saat barang dikirimkan kepada pelanggan atau pada saat jasa itu dilaksanakan. Piutang usaha hanya diakui kriteria atas pengakuan telah dipenuhi.

2. Pengukuran Piutang Usaha

Hal ini berarti bahwa piutang dilaporkan dalam jumlah bersih dari estimasi piutang tak tertagih dan diskon usaha. Piutang usaha di nilai dari harga pertukaran awal antara perusahaan dan pihak ketiga, dikurangi penyesuaian untuk diskon, retron penjualan, serta penyisihan dan piutang tak tertagih menghasilkan nilai realisasi bersih, yaitu jumlah kas yang diharapkan akan ditagih.

3. Pencatatan Piutang Usaha

Terdapat dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih, yaitu:

a. Metode Penyisihan (*Allowance method*)

Metode penyisihan untuk piutang tak tertagih dilakukan dengan cara mengestimasi jumlah piutang yang tidak tertagih pada akhir periode. Hal ini akan memberikan kesesuaian pembebanan di laporan laba rugi dan memastikan penilaian piutang berdasarkan nilai realisasi kas (bersih) di neraca. Nilai realisasi kas (bersih) adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat diterima secara tunai. Jumlah tersebut dapat diketahui melalui pengurangan akun piutang tak tertagih dari nilai piutang.

b. Metode penyisihan lebih sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan jika nilai piutang tak tertagih cukup besar. Berikut ini adalah tiga hal yang berkaitan dengan metode penyisihan:

- a. Piutang tak tertagih merupakan estimasi
- b. Piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih akan di debit ke badan piutang tak tertagih dan di kredit ke penyisihan piutang tak tertagih melalui jurnal penyesuaian pada setiap akhir periode.
- c. Jika ada sejumlah nilai piutang yang dihapuskan karena memang tidak dapat ditagih, maka akan di debit ke penyisihan piutang tak tertagih dan di kredit ke piutang usaha.

4. Penyajian dan Pengungkapan Piutang Usaha²⁵

Menurut Martini (2012), penyajian piutang di dalam laporan keuangan disajikan sebagai berikut :

1. **Piutang dagang harus disajikan di dalam neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Piutang dagang disajikan di dalam neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagihnya piutang.**
2. **Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang dagang, harus dicantumkan penjelasannya di dalam neraca bahwa saldo piutang dagang tersebut adalah jumlah bersih (netto).**
3. **Jika piutang dagang bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di dalam neraca.**
4. **Piutang dagang yang bersaldo kredit (terdapat di dalam kelompok hutang lancar)**
5. **Jika jumlahnya material, piutang non dagang harus disajikan terpisah dari piutang dagang.²⁶**

2.1.4.2 Prosedur Pengumpulan Informasi

Informasi pemahaman yang dikumpulkan auditor diperoleh dengan melakukan prosedur-prosedur berikut ini:

1. **Pertimbangan pengalaman yang lalu dari audit sebelumnya terhadap klien.**
2. **Melakukan Tanya jawab kepada manajemen dan karyawan, staff atau pengawas.**
3. **Mereview dokumen dan catatan-catatan akuntansi dan pedoman prosedur.**
4. **Observasi aktivitas dan operasi entity.²⁷**

Dalam beberapa kasus, prosedur pemahaman tersebut dapat juga memberikan informasi bukti mengenai keefektipan operasi unsur-unsur pengendalian intern. Jika itu terjadi, berarti auditor juga sekaligus telah melakukan pengujian pengendalian.

²⁵ Patrick, S. R., Herman, K., & Dhullo, A. **Analisis Sistem Pencatatan Piutang Sparepart Pada PT. Sinar Galesong Prima. Riset Akuntansi Going Concren**, 2017, hal. 1036-1037.

²⁶ Sylvia, N. V., Dwi, & Martani. **Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK**. Jakarta: Salemba Empat, 2012

²⁷ Victor, S. H., & Danri, S. T., **OP.CIT.**, hal. 5

2.1.4.3 Prosedur Penagihan Piutang

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang berhubungan dengan debitur, maka akan ada banyak kendala yang timbul karena belum tentu para debitur membayar tagihannya.

Adapun prosedur penagihan secara terperinci yang dikemukakan oleh (Dolli, 2013) Mengatakan bahwa, prosedur penagihan piutang sebagai berikut:

1. **“Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.**
2. **Bagian penagihan mengirimkan penagihan, yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur.**
3. **Bagian penagihan mengirimkan giro atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur.**
4. **Bagian penagihan menyerahkan giro kepada bagian kas.**
5. **Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang.**
6. **Bagian kas mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.**
7. **Bagian kas menyetorkan giro atas nama.”²⁸**

Dalam pengawasan penagihan, manajemen harus mempunyai strategi khusus, ketat tetapi tidak menimbulkan kecurigaan melainkan harus menciptakan suasana kepercayaan sehingga para pegawai bagian penagihan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan leluasa. Tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penyelewengan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kemungkinan kecurangan

²⁸ Dolli, S. P. *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan Dan Penagihan Piutang Pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado. EMBA*, 2013, hal. 425.

disini mempunyai peluang besar jika pengendalian dan pengawasan diterapkan bersifat longgar. Dalam hal ini jangan sampai terjadi kasus pelanggan yang sudah membayar tetapi belum dilaporkan kebagian akuntansi dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan kesalahan terjadi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk membantu proses penelitian ini, penulis juga mencari informasi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern atas piutang, yaitu seperti tabel dibawah;

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gary Hamel (2013)	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada PT. Nusantara Surya Sakti	Sistem pengendalian intern unsur lingkungan pengendalian kurang efektif karena kurangnya pemeriksaan yang dilakukan audit internal untuk mengatasi praktek pelaporan keuangan dan membantu struktur keuangan dalam menyelesaikan fungsi pertanggungjawaban, sehingga dapat membuka peluang terjadinya kecurangan. ²⁹

²⁹ Gary, H. **Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada PT. Nusantara Surya Sakti.** *Jurnal EMBA*, 2013, hal. 274-281

2	Saraswati (2012)	Analisis Efektivitas Penerapan Struktur Pengendalian Intern Piutang Usaha Dalam Meminimalkan Kerugian dan Memberikan Informasi yang Relevan Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Hasrat Multifinance Manado	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern piutang usaha PT. Hasrat Multifinance Manado sudah cukup efektif, yaitu dengan menguji efektifitas penerapan struktur pengendalian intern piutang usaha yang dilakukan, dalam meminimalkan kerugian dan memberikan informasi yang relevan dalam penyajian laporan keuangan.
3	Natalia Nur Afifah	Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Pada PT. Gama Inti Samudera	Sistem pengendalian internal atas piutang belum berjalan sesuai dengan komponen sistem pengendalian internal yang dijelaskan dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). ³⁰
4	Novi Vizainiyah (2020)	Analisis Pengendalian Intern Atas Piutang Pada PT. BPR Rajekwesi Sumberrejo Bojonegoro	Hasil analisis pengendalian intern atas piutang pada PT. BPR Rajekwesi Sumberrejo Bojonegoro bahwa secara keseluruhan pengendalian intern sudah berjalan efektif ³¹
5	Rahmat Mulyana Dali; Reja Ramdhani	Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Piutang Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Kas Pada PT. Bentara Sinergies Multifinance	Perusahaan sudah melaksanakan sistem pengendalian intern atas piutang dengan baik hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab secara tepat, adanya sistemotorisasi dan pencatatan yang tepat,

³⁰ Natalia, A. N. (n.d.). **Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Pada PT. Gama Inti Samudera**. hal. 1-20.

³¹ Novi, V. **Analisis Pengendalian Intern Atas Piutang Pada PT. BPR Rajekwesi Sumberrejo Bojonegoro. Akuntansi manajemen**, 2020, hal. 29

			adanya praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, dan juga karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab. Maka secara umum sistem pengendalian intern yang diterapkan sudah cukup efektif. ³²
6	Novi Khoiriawati; Zuni Barokah (2019)	Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal Atas Piutang (Studi Pada PT. X)	Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian internal atas piutang, diketahui bahwa terdapat 9 kelemahan pada pengendalian yang telah diterapkan. Serta faktor-faktor yang menghambat pengendalian internal atas piutang meliputi tiga hal, yaitu gaya kepemimpinan manajemen, keahlian sumber daya manusia, dan pertimbangan biaya manfaat. ³³

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pengendalian internal atas piutang. Serta tujuan yang sama yaitu adalah bagaimana suatu perusahaan meyakini kebenaran jumlah piutang yang ada yang benar-benar menjadi hak milik perusahaan, meyakini bahwa piutang yang ada dapat ditagih, ditaatinya kebijakan-

³² Rahmat, D. M., & Reza, R. (n.d.). **Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Piutang Dalam Meningkatkan Efektifitas Penerimaan Kas Pada PT. Bentara Sinergies Multifinance.** *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 73-83.

³³Novi, K., & Zuni, B. **Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal Atas Piutang (Studi Pada PT. X).** *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 2019, hal. 83-91.

kebijakan mengenai piutang, serta piutang aman dari terjadinya penyelewengan.

Serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini mengambil tempat penelitian di PT. Perkebunan Nusantara III Medan

2.3 Kerangka Berpikir

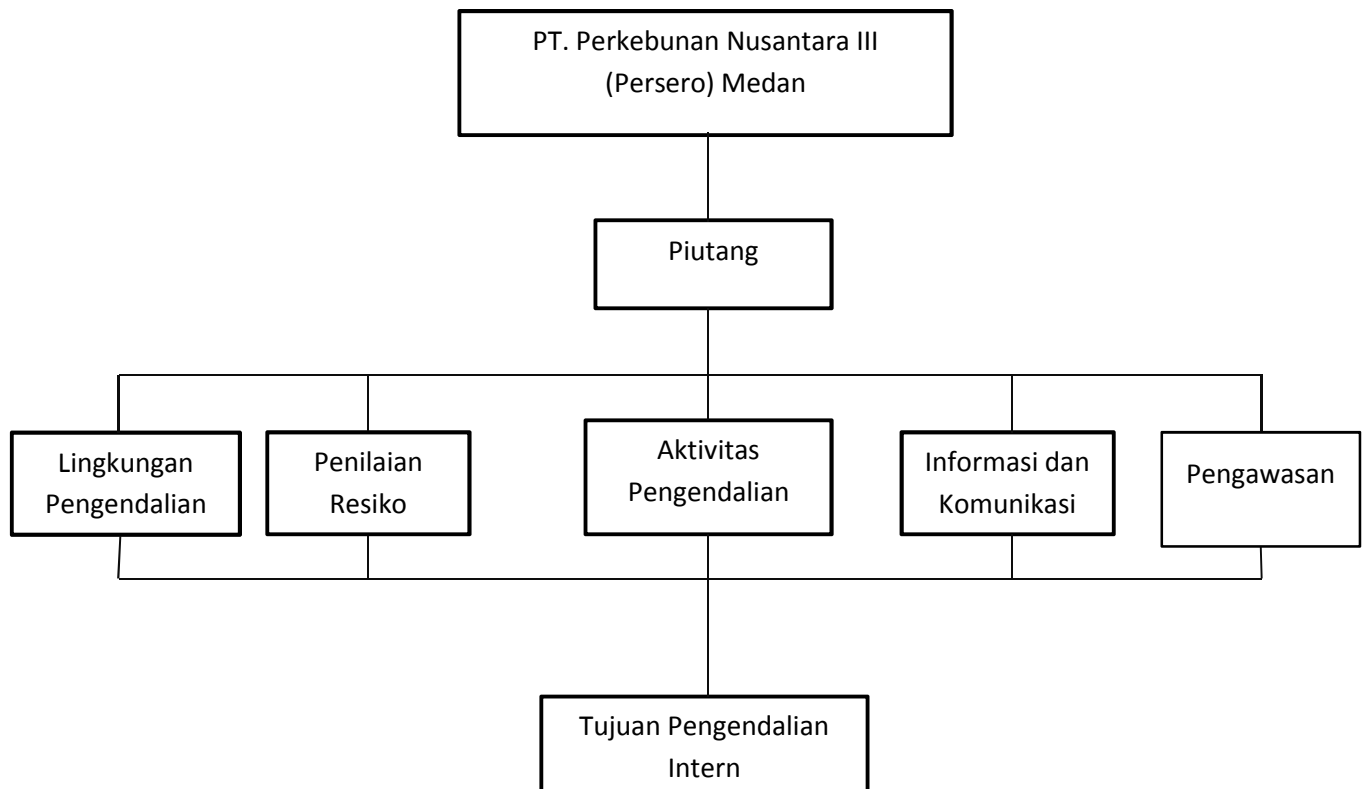
PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Dilihat dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, piutang merupakan suatu komponen aktiva lancar yang sangat memegang peranan yang besar dalam upaya tercapainya tujuan perusahaan. Sehingga piutang harus memiliki pengawasan yang sangat baik agar terhindar dari penyelewengan/ kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan atau pihak lain, yang dapat merugikan perusahaan.

Untuk itu sistem pengendalian internal berperan penting untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan perusahaan. Sistem pengendalian intern merupakan suatu metode yang digunakan untuk menjaga asset perusahaan, mengecek laporan atau data akuntansi dan sebagai motivasi agar dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern yaitu meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Pada saat pelaksanaan manajemen piutang,

resiko kecurangan karyawan atas kas, serta resiko kegagalan menagih piutang merupakan masalah yang sangat perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian intern untuk menilai pelaksanaan pengawasan intern serta mengetahui kebijakan manajemen perusahaan dalam menjalankan tugasnya.

Jadi masalah- masalah tersebut yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pengendalian intern atas piutang pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Serta untuk mengevaluasi pengendalian intern piutang yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan berkesinambungan (*going concern*). Berikut ini merupakan kerangka berfikir dalam menerangkan alur penelitian yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Sistem Pengendalian Intern Dalam Penagihan Piutang



Sumber : <https://kamus.tokopedia.com/p/pengendalian-intern>

Berdasarkan gambar kerangka berfikir tersebut maka dapat dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern dalam penagihan piutang harus memenuhi unsur-unsur pengendalian intern. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijaksanaan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen perusahaan, direktur dan konsumen serta pemilik suatu satuan terhadap pengendalian atas satuan usaha. Penerapan resiko oleh manajemen adalah bagian dari penerapan

dan pengoperasian pengendalian internal untuk meminimalkan resiko. Aktivitas pengendalian yaitu kebijakan dan prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas dalam mengatasi resiko pengendalian telah dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu perusahaan penelitian diperlukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan efektif serta sistematis. Desain penelitian merupakan pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan penelitian.

Pengertian desain penelitian menurut Umar yaitu :

“Desain penelitian dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset.”³⁴

Sedangkan menurut (Mohammad, 2005) dalam bukunya metode penelitian menerangkan bahwa :

“Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.”³⁵

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa desain penelitian adalah suatu bentuk pengumpulan data yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh informasi atau tujuan dilakukannya penelitian tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, deskriptif kualitatif yakni penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Triangulasi pada

³⁴ Umar, **Menulis Karya Ilmiah** (<https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian/>)

³⁵ Mohammad, N. **Metode Penelitian**, (Cetakan Keenam ed.). Bogor Selatan: Ghalatia Indonesia, 2005

penelitian kualitatif ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

3.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat suatu permasalahan yang ingin diteliti dan akan menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian tersebut dilakukan. Penulis melakukan penelitian ini di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Komoditi yang diusahakan adalah kelapa sawit, dan karet. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan ini beralamat di Jalan Sei Batang Hari No.2, Simpang Tanjung, Medan Sunggal, Simpang Tj.,Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan keputusan suatu kebijakan. Secara sederhana data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Serta data juga dapat diperoleh dari berbagai cara, yang dapat diolah menjadi suatu informasi yang dapat dipercaya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ahmad, **“Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data, sehingga data itu dapat direduksi. Reduksi data adalah**

upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.”³⁶

Dari penjelasan tersebut diperoleh bahwa, data kualitatif adalah jenis data yang digunakan para peneliti untuk menjelaskan atau menggambarkan informasi secara jelas/fakta yang tidak bisa dipalsukan. Dari pengertian penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan informasi- informasi yang dapat mendukung penelitian. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari suatu jurnal atau peneliti sebelumnya yang berkaitan tentang sistem pengendalian intern atas piutang dan juga informasi dari bagian operasional keuangan dan akuntansi (BOKA) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Jadongan Sijabat mengatakan bahwa; **“Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).”³⁷** Dengan bentuk wawancara dengan Asisten Konsolidasi Laporan Keuangan dari Bagian Operasional Keuangan dan Akuntansi (BOKA) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Serta Jadongan Sijabat juga mengatakan bahwa; **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).”³⁸** Seperti; penelitian- penelitian sebelumnya, stuktur organisasi, prosedur penagihan piutang yang mampu mendukung penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

³⁶ Ahmad, R. *Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah*, 2018, hal. 83

³⁷ Jadongan Sijabat, *Metode Penelitian*, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, 2014, Hal. 85

³⁸ *Ibid.*, Hal. 82

Suatu aktivitas penelitian membutuhkan data-data yang akan diolah, dianalisis, dan diuji untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Juliandi dan Azuar mengatakan bahwa, **“Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian”**.³⁹

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara.

- a. Metode Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berbentuk tulisan seperti sejarah singkat, struktur organisasi, kerangka konseptual yang terdapat pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Dalam penelitian ini, data tersebut dapat diambil dari Bagian Operasional Keuangan dan Akuntansi (BOKA) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
- b. Metode Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara secara online maupun secara langsung yaitu dengan mewawancarai Asisten Konsolidasi Laporan Keuangan dari Bagian Operasional Keuangan dan Akuntansi (BOKA) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Wawancara secara online ini biasa menggunakan Via WhatsApp. Serta metode ini banyak memberikan data-data/ informasi yang memudahkan peneliti dalam mengerjakan.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi dalam pengelolaan data ini yang digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Dalam menganalisis suatu masalah, dapat dilakukan dengan

³⁹ Juliandi, & Azuar, I. d. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Medan: Umsu Press, 2015

beberapa metode analisis data, yang harus disesuaikan dengan data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Untuk menganalisis suatu masalah, metode yang digunakan peneliti adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis data.

Menurut Arikunto mengatakan, **“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.”**⁴⁰

Metode analisis deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Serta analisis data yang digunakan dalam mendukung proses penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Berikut ini adalah langkah- langkah metode analisis deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti yaitu:

1. Mencari dan Mengumpulkan Data

Peneliti mencari dan mengumpulkan data dari lapangan (perusahaan) sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan, yang dapat membantu proses penelitian.

2. Reduksi Data

Setelah penulis mendapatkan hasil dari pengumpulan data dari lapangan, penulis mereduksi data-data tersebut. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal paling penting. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, yang mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Analisis Data

Selanjutnya penulis menganalisis data yaitu dengan mempelajari segenap bagaimana lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan

⁴⁰ Arikunto, & Suharsimi. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: Rineka Cipta, 2019

komunikasi, serta bagaimana pengawasan yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, kemudian peneliti menganalisis data dari perusahaan yang meliputi bagaimana penerapan sistem pengendalian intern atas piutang serta membandingkan dengan teori-teori yang sudah ada, untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern atas piutang pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dan mencari apakah sistem pengendalian intern atas piutang sudah sesuai dengan teori yang sudah ada atau belum.

4. Penyajian Data

Setelah penulis melakukan analisis data, selanjutnya penyajian data dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh, baik dari perusahaan maupun dari teori-teori yang sudah ada untuk mengetahui gambaran bagaimana sistem pengendalian intern atas piutang pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, dan kemudian menarik kesimpulan.

5. Membuat Kesimpulan

Tahap akhir dari proses penelitian ini adalah membuat kesimpulan, yang dapat diperoleh setelah melalui semua tahap penelitian dari; mencari dan mengumpulkan data, mereduksi data, menganalisis data, dan penyajian data yang sudah dijelaskan.